



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN *MASTER PLAN SMART CITY* BOYOLALI
TAHUN 2019-2023

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Misi Ketujuh Pembangunan Daerah Boyolali yang maju dan berteknologi, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182);
11. Peraturan Daerah....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN *MASTER PLAN SMART CITY* BOYOLALI TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

5. Dinas....

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik.
6. *Smart City* Boyolali adalah penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021.
7. *Master Plan Smart City* Boyolali adalah dokumen yang mengimplementasikan Visi Boyolali “Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera” dan misi Boyolali “Boyolali berdaya saing, maju, dan berteknologi” untuk membangun Boyolali yang maju dan unggul serta mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Master Plan Smart City* Boyolali memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2019-2023 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Boyolali.
- (2) *Master Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi arah pelaksanaan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika *Master Plan Smart City* Boyolali meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI *SMART CITY* KABUPATEN BOYOLALI
 - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
 - d. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH
 - e. BAB V PETA JALAN *SMART CITY* DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Rincian sistematika *Master Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV....

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SMART CITY*

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dilaksanakan dari Tahun 2019;
 - b. Tahap II dilaksanakan dari Tahun 2020;
 - c. Tahap III dilaksanakan dari Tahun 2021;
 - d. Tahap IV dilaksanakan dari Tahun 2022; dan
 - e. Tahap V dilaksanakan dari Tahun 2023.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh BP3D dan Diskominfo melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkoordinasi dengan BP3D dan Diskominfo.

BAB V

KELEMBAGAAN *SMART CITY*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali, Bupati membentuk Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Boyolali.
- (2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pembina dan Tim Pelaksana *Smart City* Boyolali akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Diskominfo.
- (3) Kepala Diskominfo dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII LAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali di lingkup kerjanya masing-masing per semester kepada Bupati dengan Tembusan Kepala Diskominfo.
- (2) Diskominfo secara berkala melaporkan pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Kebijakan *Smart City* Boyolali bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali; dan
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati Boyolali ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2017 tentang Arah Kebijakan *Smart City* Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10....

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Oktober 2019

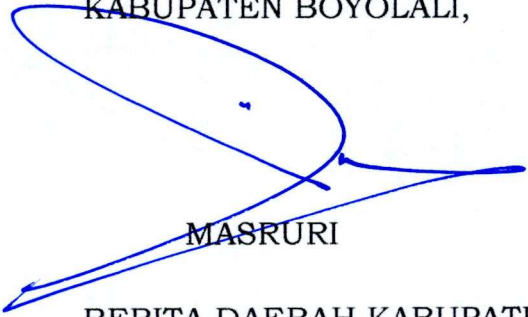
BUPATI BOYOLALI,



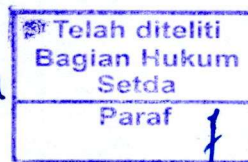
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN *MASTER PLAN SMART CITY* BOYOLALI TAHUN 2019-2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Smart City didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memantau, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam daerah dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Definisi lain *Smart City* adalah *“A developed urban area that creates sustainable economic development and high quality of life by excelling in multiple key areas: Economy, mobility, environment, people, living and government. Excelling in these key areas can be done so through strong human capital, social capital, and/or ICT (Information and Communication dan Technology) infrastructure”*. Artinya “perkotaan yang telah berkembang dengan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup dengan memiliki keunggulan di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, mobilitas, lingkungan, masyarakat, kehidupan, dan pemerintahan. Keunggulan ini dapat diperoleh dengan sumber daya manusia, kondisi sosial, maupun infrastruktur Teknologi Informormasi dan Komunikasi (TIK) yang kuat”.

Smart City Boyolali merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2016-2021 (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016). Visi Boyolali “Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera” dan misi Boyolali “Boyolali berdaya saing, maju, dan berteknologi” ini memberi semangat untuk membangun Boyolali yang maju dan unggul (memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dibanding daerah lain) serta mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi *Smart City* Boyolali adalah Boyolali menjadi *Smart City* berbasis perencanaan daerah yang baik, pemerintah yang berkualitas, keterbukaan informasi dan teknologi yang mendukung berbagai aktivitas menuju ekonomi yang makmur. Sedangkan misinya sebagai berikut :

1. Boyolali akan menjadi daerah yang nyaman ditinggali, dengan teknologi yang canggih, tempat pilihan untuk tinggal, bekerja, dan berwisata;
2. Boyolali akan mengembangkan lingkungan yang mendorong dan memanfaatkan sinergi antara pusat penelitian, teknologi, pendidikan, usaha, dan kreatifitas; dan
3. Boyolali akan meningkatkan daya saing ekonomi, mobilitas, lingkungan yang berkelanjutan, memperkaya hubungan sosial dan komunitas, serta menyatukan keanekaragaman budaya dan warisan yang dimiliki.

Smart City Boyolali dimulai akhir tahun 2016, yang pada awal pelaksanaannya, pemahaman *Smart City* lebih kearah kepemilikan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta lebih fokus pada *Smart Government*, atau penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu memenuhi infrastruktur, akses internet, dan penerapan aplikasi/sistem informasi.

Beberapa kegiatan akhir 2016 yang dilaksanakan antara lain pengadaan *server* (peningkatan kapasitas), pengadaan email Boyolali, pengadaan CCTV (*Closed Circuit Television*), pengadaan peralatan dan aplikasi VoIP (*Voice over Internet Protocol*) dan pengadaan aplikasi *Document Management System (DMS)*. Kegiatan ini untuk meletakkan dasar penerapan kota cerdas dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disadari karena fungsinya, pemerintah sudah semestinya menerapkan kebijakan yang dibuat lebih dahulu dari pada *stakeholder* lain. Pengalaman menerapkan *Smart Government* dapat digunakan sebagai “modal” untuk menyelenggarakan *Smart City* secara keseluruhan.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama membangun infrastruktur *Smart City* (dengan anggaran besar) dan masih fokus pada *Smart Government*, antara lain pembangunan gedung *Smart City Center (Data Center)*, pengadaan peralatan *Data Center* penambahan server, pengadaan jaringan internet (kabel *fiber optic*), pengadaan akses internet (*bandwidth*), pengadaan perangkat CCTV, pengadaan perangkat Wifi. Selain itu juga pengadaan peralatan dan optimasi aplikasi VoIP, pengadaan beberapa aplikasi/sistem informasi, serta peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tahap ini merupakan tahap awal membangun ekosistem *Smart City* Boyolali, yang meliputi infrastruktur dan jaringan, akses internet, pengelolaan sistem informasi/aplikasi, pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*).

Tahun 2018 melanjutkan pembangunan ekosistem *Smart City* Boyolali dan masih fokus pada *Smart Government*, antara lain penambahan kapasitas server, pengadaan peralatan data center, pengadaan jaringan internet (kabel *fiber optic*), pemasangan perangkat CCTV, pemasangan perangkat Wifi, pengadaan peralatan VoIP, pengadaan sistem informasi/aplikasi, peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi, integrasi data/sistem informasi dan tata kelola *e-Government* mendukung *Smart City*. Tahap ini direncanakan sudah mulai kelihatan hasil dari *Smart City* dimulai dari kemudahan akses internet untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, kemudahan akses internet bagi masyarakat, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan integrasi data/sistem informasi, dan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan aplikasi dan sistem informasi *online*.

Tahun 2019 dan seterusnya merupakan tahun penerapan *Smart City* secara keseluruhan bersamaan dengan perubahan konsep dan rencana *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2021, meliputi *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Pada tahun ini

semua *stakeholder* diharapkan terlibat/berperan/berkontribusi untuk *Smart City* Boyolali yang diinisiasi masing-masing perangkat daerah yang membidangi. Perubahan paradigma *Smart City* identik dengan teknologi menjadi *Smart City* tidak identik dengan teknologi juga menjadi bagian penting dari era *Smart City* saat ini.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya pedoman pelaksanaan *Smart City* Boyolali yang baru. Pedoman baru tersebut memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan *Smart City* Boyolali yang melibatkan semua *stakeholder* dan semua dimensi. Pedoman baru tersebut berupa *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023.

1.2. Tujuan *Master Plan*

Tujuan penyusunan *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 adalah memberi arah pelaksanaan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dan pelaksanaan *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 255);
- l. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 13);

1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

Dokumen *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 tidak bisa terlepas dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku. Sasaran dan visi pembangunan *Smart City* merupakan penjabaran dari sasaran dan visi pembangunan Kabupaten Boyolali baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).

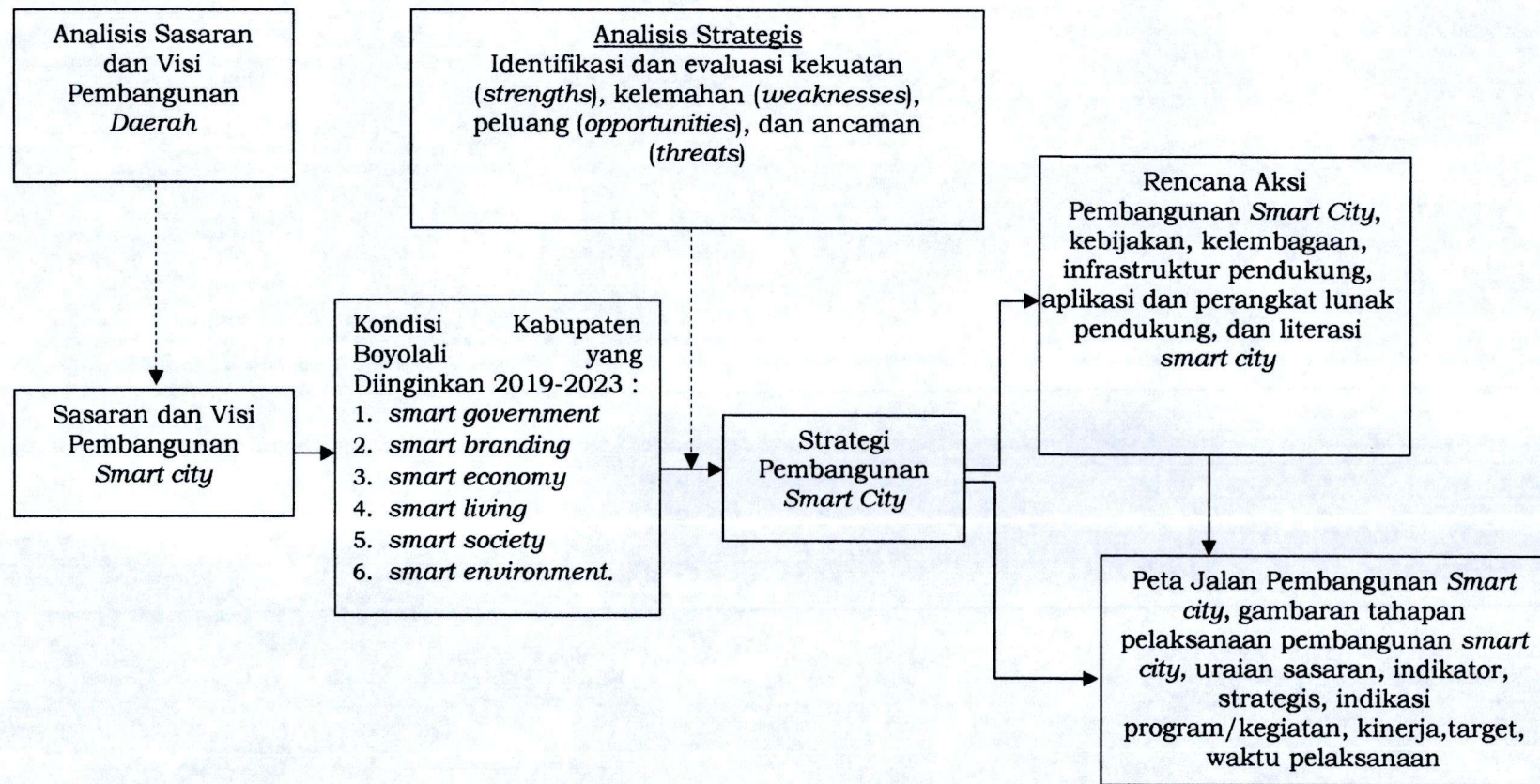
Strategis pembangunan *Smart City* dirumuskan melalui Analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu kebijakan/program. Metode ini diawali dengan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Hasil

SWOT berupa strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan *Smart City* .

Strategi pembangunan *Smart City* selanjutnya diterjemahkan dalam dalam rencana aksi pembangunan *Smart City*. Aksi atau kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dirumuskan dengan jelas meliputi sasaran, indikator, kinerja, target, waktu pelaksanaan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Kejelasan rencana aksi ini akan memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan *Smart City* Boyolali dapat berjalan sesuai rencana.

Gambaran mengenai kegiatan-kegiatan dan tahapan pelaksanaan *Smart City* dapat menunjukkan peta jalan pelaksanaan pembangunan *Smart City* Boyolali dapat memudahkan semua *stakeholder* memahami jalan yang akan dilalui dalam melaksanakan pembangunan *Smart City* dan dan rambu-rambunya. Selain itu peta jalan *Smart City* ini akan memberikan gambaran yang jelas kondisi *Smart City* Boyolali yang aan diwujudkan sesuai visi pembangunan *Smart City* Boyolali.

Berikut skema kerangka pikir pembangunan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir *Masterplan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023

BAB II VISI *SMART CITY BOYOLALI*

2.1 Sasaran Pembangunan *Smart City*

Sasaran *Smart City* Boyolali harus selaras dengan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boyolali berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Kedua sasaran perencanaan tersebut sinkron, saling mendukung, dan saling menguatkan. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah memiliki posisi paling kuat dalam perencanaan. Sehingga pelaksanaan *Smart City* yang membutuhkan anggaran dipastikan mendukung/melaksanakan amanat pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Konsep kota cerdas (*Smart City*) yang diterapkan Kabupaten Boyolali meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Keenam dimensi *Smart City* tersebut membentuk *Smart City* secara keseluruhan. Mencermati keseluruhan sasaran pembangunan daerah dan berdasar analisis masa depan, analisis kesiapan, dan analisis kesenjangan (Buku I *Smart City* Boyolali) dirumuskan sasaran *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 yang selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. *Smart Government* dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. Terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. Terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah.
2. *Smart Branding* dengan sasaran :
 - a. Terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik pasaran (*Tourism Branding*);

- b. Terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik pasaran (*Business Branding*); dan
 - c. Terbangunnya wajah kota yang menarik pasaran (*City Appearance Branding*).
- 3. *Smart Economy* dengan sasaran :
 - a. Terbangunnya boyolali pro investasi dan ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*);
 - b. Terwujudnya kesejahteraan rakyat berbasis produk unggulan daerah (*welfare*); dan
 - c. Terbangunnya ekosistem transaksi keuangan (*transaction*) yang mudah dan cepat.
- 4. *Smart Living* dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat yang memadai;
 - c. Terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadai serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. Terciptanya lalu lintas yang nyaman bagi masyarakat.
- 5. *Smart Society* dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya interaksi masyarakat yang efisien (*community*);
 - b. Terbangunnya ekosistem belajar yang efisien (*learning*);
 - c. Terwujudnya sistem keamanan masyarakat (*security*); dan
 - d. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.
- 6. *Smart Environment* dengan sasaran :
 - a. Berkembangnya program pengendalian kualitas lingkungan (*protection*);
 - b. Berkembangnya tata kelola sampah dan limbah (*waste*); dan
 - c. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan.

2.2 Visi Pembangunan *Smart City*

Penentuan visi *Smart City* Boyolali dilakukan dengan indikator sasaran *Focus Group Discussion (FGD)* dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah (RPJMD Tahun 2016-2021) "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera" serta tagline "*Boyolali Smile of Java*". "*Boyolali Smile of Java*" mengandung

makna Boyolali merupakan kabupaten yang nyaman dikunjungi, disinggahi, dan ditinggali (dihuni). Boyolali selalu siap menerima semua orang dengan keramahannya, sehingga orang yang berkunjung, singgah, dan ingin kembali ke Boyolali lagi serta merasa nyaman dan betah tinggal di Boyolali. *Tagline* ini sebenarnya tidak lepas dari slogan selama ini, yaitu “Boyolali Tersenyum”, yang merupakan singkatan dari tertib, sehat, elok, nyaman untuk masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan rumusan visi masing-masing dimensi *Smart City* , sebagai berikut :

1. *Smart Government*

Visi Smart Government adalah Boyolali berkinerja, maju, dan melayani. Pemerintahan Boyolali menjadi pemerintah yang cerdas yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan memiliki birokrasi yang kinerja tinggi, inovatif adaptif berbasis teknologi serta mampu mewujudkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi.

2. *Smart Branding*

Visi Smart Branding adalah Boyolali pilihan kunjungan. Mem-*Branding* Boyolali secara cerdas, yaitu membuat Boyolali memiliki daya saing dengan meningkatnya daya tarik wisata, wajah kota, serta bisnis berbasis unggulan dan kekhasan Boyolali dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional.

3. *Smart Economy*

Visi Smart Economy adalah Boyolali unggul, sejahtera, dan maju. Boyolali memiliki perekonomian yang mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, perkembangan sektor ekonomi unggulan daerah, dan adaptif terhadap perubahan serta menyejahterakan masyarakat.

4. *Smart Living*

Visi Smart Living adalah Boyolali kota hijau, kota air, dan nyaman ditinggali. Membangun Boyolali menjadi hunian yang cerdas yang mampu mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, nyaman, terjangkau, efektif, dan efisien.

5. *Smart Society*

Visi Smart society adalah Boyolali yang aman, nyaman, cerdas, sejahtera, dan berbudaya. Membangun masyarakat menjadi masyarakat cerdas yang mampu mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis baik fisik maupun virtual, produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* (melek digital) yang tinggi.

6. *Smart Environment*

Visi Smart Environment adalah Boyolali bersih dan hijau. Membangun lingkungan Boyolali yang cerdas yang mampu mewujudkan Boyolali memiliki kualitas lingkungan yang baik, bersih, serta memiliki iklim mikro yang nyaman dan sejuk.

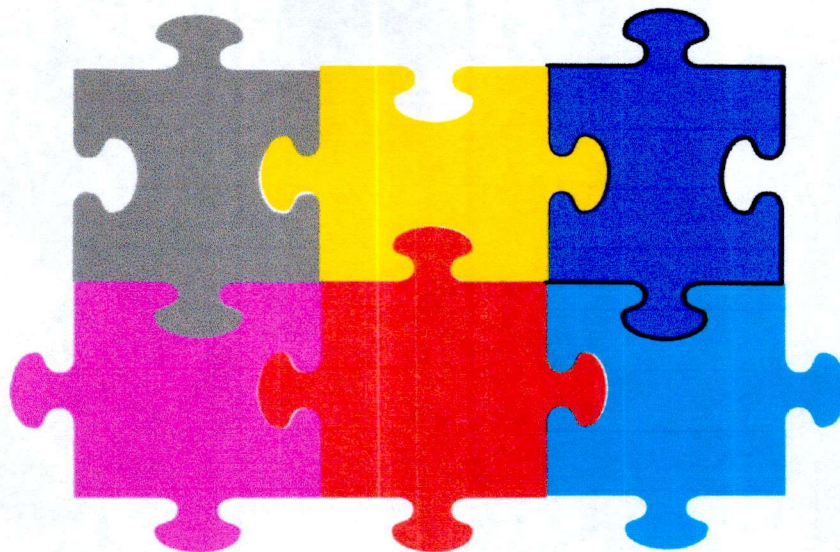
Dari visi-visi tersebut di atas dapat dirumuskan visi *Smart City Boyolali* Tahun 2019-2023 adalah Boyolali yang maju, menarik, nyaman ditinggali dan menyejahterakan masyarakat.

Boyolali yang Maju berarti Kabupaten Boyolali selalu bergerak dan berada di barisan depan, menjadi pelopor, dan selalu mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Boyolali yang Menarik berarti Kabupaten Boyolali mempunyai keunggulan yang dapat menarik orang untuk memilih berinvestasi, bekerja, berwisata, dan tinggal di Boyolali. Boyolali yang Nyaman ditinggali berarti Kabupaten Boyolali mempunyai lingkungan tempat tinggal yang tertib, bersih, indah, tertata serta aman dan kondusif sehingga orang akan betah tinggal di Boyolali. Sedangkan Boyolali yang Menyejahterakan Masyarakat berarti Kabupaten Boyolali memiliki masyarakat meningkat keterpenuhannya atas kebutuhan ekonomi dan sosial.

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1 Analisis SWOT

Membangun Boyolali mewujudkan visi pembangunan *Smart City* Boyolali seperti membuat dan menata *puzzle* dalam satu bingkai menjadi satu kesatuan sehingga dapat memberikan gambaran utuh dari *Smart City* Boyolali. Adanya lubang pada bingkai *puzzle* menyebabkan gambar yang tersebut dari *puzzle-puzzle* tidak sempurna. Potongan-potongan *puzzle* tersebut adalah bagian yang akan ditempelkan oleh stakeholder yang terlibat dalam membangun *Smart City* Boyolali. Stakeholder dikelompokkan dalam dimensi *Smart City* , yaitu *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart living*, *Smart society*, dan *Smart Environment*.



Gambar 3.1 Ilustrasi Pembangunan *Smart City*

Penentuan strategi pelaksanaan *Smart City* Boyolali dilakukan analisis strategis yang biasa digunakan, yaitu Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek/program. Metode ini diawali dengan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut:

A. Faktor internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi yang ditunjukkan dengan “Boyolali yang Maju dan Berteknologi” menjadi salah satu misi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali;
- b. Anggaran untuk *Smart City* Boyolali cukup besar baik yang dikelola oleh Diskominfo maupun Perangkat Daerah lain;
- c. Terbangun *data center* sebagai salah satu infrastruktur pendukung *Smart City* Boyolali dan jaringan kabel *Fiber Optic* (FO) di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. Mempunyai produk unggulan pertanian (sayur), susu sapi, dan perikanan darat;
- e. Memiliki alam pegunungan, gunung berapi, dan kawasan mata air yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata besar;
- f. Jalur Solo-Semarang dan jalur wisata Solo-Selo-Borobudur (SSB) merupakan potensi untuk pengembangan wisata Boyolali dan peningkatan perekonomian masyarakat;
- g. Curah hujan wilayah Boyolali termasuk tinggi merupakan potensi penyediaan kebutuhan air baku bagi masyarakat;
- h. Kondisi kualitas lingkungan di Boyolali relatif masih baik antara lain udara masih relatif bersih (tingkat pencemaran masih dibawah baku mutu) dan kualitas air sebagian besar sungai juga masih sesuai baku mutu;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Prosentase sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kecil sehingga pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam *Smart City* menjadi lebih berat;
- b. Perbedaan pemahaman pihak-pihak dalam melaksanakan *Smart City* ada kecenderungan pelaksanaan *Smart City* merupakan tugas dan tanggungjawab Diskominfo;
- c. Tata kelola dan pengorganisasian pelaksanaan *Smart City* belum optimal sehingga pelaksanaannya pun juga belum

optimal dan belum semua pihak berperan dalam pelaksanaan *Smart City*;

- d. Wilayah Kabupaten Boyolali cukup luas dengan topologi pengunungan sehingga masih ada area-area yang belum terjangkau jaringan internet yang memadai; dan
- e. Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali merupakan daerah kering dan mempengaruhi ketersediaan kebutuhan air baku bagi masyarakat dan mempengaruhi kenyamanan huni.

B. Faktor eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Banyak perguruan tinggi yang dapat mendukung/ membantu penerapan *Smart City* Boyolali;
- b. Banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Boyolali yang memiliki jurusan unggulan (pertanian) dan jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Banyak penyedia barang/jasa yang dapat bekerjasama mendukung penerapan *Smart City* Boyolali;
- d. Pemerintah dan pemerintah provinsi mendukung penerapan *Smart City* daerah baik berupa kebijakan dan fasilitas, maupun pembinaan;
- e. Ada beberapa kabupaten/kota yang juga sudah melaksanakan kebijakan *Smart City* yang dapat menjadi tempat belajar;
- f. Tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang cepat, mudah dan murah (tidak dipungut biaya);
- g. Banyak perusahaan menengah besar yang dapat mendukung pendanaan dan pelaksanaan program *Smart City*;
- h. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung percepatan penerapan *Smart City*;
- i. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan koneksi internet dalam melakukan aktivitas kehidupan;
- j. Adanya program-program inovasi yang dapat mendukung percepatan penerapan *Smart City*;

- k. Adanya relawan-relawan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penerapan *Smart City* Boyolali; dan
 - l. Kejenuhan industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya mendorong pengusaha memindahkan tempat usaha ke daerah lain yang lebih baik.
2. Tantangan (*Theaths*)
- a. Banyak pemerintah daerah lain yang juga mengembangkan *Smart City* sehingga pelaksanaan *Smart City* menjadi kurang menarik;
 - b. Perkembangan teknologi yang mengancam keamanan jaringan dan sistem informasi yang dibangun pemerintah daerah untuk mendukung penerapan *Smart City*;
 - c. Belum adanya keterlibatan yang nyata kementerian/lembaga yang terkait dalam pengembangan *Smart City* daerah sehingga berdampak pada tidak adanya pendanaan dan keterlibatan banyak pihak untuk mendukung *Smart City* di daerah; dan
 - d. Adanya jalan tol Salatiga-Solo yang mengurangi kesempatan orang mengenal Boyolali dan kesempatan mengembangkan Boyolali.

Berdasar analisis *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* (SWOT) ini diperoleh beberapa strategis pilihan untuk pelaksanaan *Smart City* Boyolali, sebagai berikut:

- 1. Membangun kerjasama dengan pemerintah/pemerintah provinsi, pengusaha, penyedia barang/jasa dan relawan untuk mengembangkan produk unggulan daerah (unggulan pertanian (sayur), susu sapi dan perikanan darat) dan potensi wisata Boyolali (unggulan pertanian (sayur), susu sapi dan perikanan darat);
- 2. Memprioritaskan anggaran untuk penyediaan akses internet bagi masyarakat, program inovasi daerah dan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah;

3. Memanfaatkan *data center*, jaringan, serta teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk mendukung program/kegiatan *Smart City* Boyolali;
4. Membangun dan mengembangkan sistem pemasaran produk lokal/unggulan menggunakan media *online*;
5. Membangun kerjasama dengan pemerintah/pemerintah provinsi, pengusaha, penyedia barang/jasa dan relawan untuk meningkatkan sumber daya air;
6. Mengembangkan *Smart City* Boyolali sesuai kebutuhan masyarakat dan mempunyai ciri khas Boyolali, khususnya dalam penataan daerah, pengembangan pariwisata dan “icon” Boyolali;
7. Membangun sistem pengamanan informasi yang memadai;
8. Mengusulkan dan memfasilitasi program/kegiatan *Smart City* dari pemerintah/ pemerintah provinsi di Kabupaten Boyolali;
9. Mengembangkan kreatifitas dan daya tarik Boyolali;
10. Melaksanakan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan pengelolaan lalu lintas yang baik;
11. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang TIK;
12. Membentuk dan mengoptimalkan peran forum *Smart City* Boyolali yang melibatkan semua *stakeholder*;
13. Bekerjasama dengan pemerintah/pemerintah provinsi, pengusaha dan penyedia barang/jasa untuk meningkatkan akses internet bagi masyarakat;
14. Menerapkan inovasi, teknologi dan manajemen pengelolaan sumber daya air;
15. Menyebarkan/luaskan informasi Boyolali melalui media sosial, media elektronik dan media informasi lainnya; dan
16. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan *Smart City* Boyolali.

3.2 Dimensi *Smart City*

Strategi-strategi diatas merupakan strategi umum dan merupakan pilihan untuk melaksanakan pembangunan *Smart City* Boyolali. Sedangkan strategi masing-masing dimensi *Smart City* diuraikan tersendiri untuk memberikan kejelasan strategi masing-masing dimensi *Smart City*.

3.2.1 *Smart Government*

Smart Government diimplementasikan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi dan pelayanan publik. Strategi pembangunan *Smart Government* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Strategi Pembangunan *Smart Government*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel	Index Penyelenggaraan <i>e-Government</i>	Penyederhanaan alur penyelenggaraan pemerintahan
			Penerapan sistem yang terintegrasi
		Cakupan penyediaan informasi publik	Peningkatan keterbukaan informasi publik
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah
2.	Terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Penerapan reformasi birokrasi
		Persentase pegawai yang memiliki latar belakang TIK dan memiliki keahlian TIK	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi
		Persentase perangkat	Peningkatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
		daerah selalu mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	penggunaan sistem informasi yang <i>user friendly</i> dengan <i>security system</i> yang memadahi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
		Prosentase perangkat daerah yang melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan tatakelola birokrasi yang adaptif-inovatif terhadap perkembangan dan kondisi lingkungan serta kebutuhan publik.
3.	Terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan layanan publik yang transparan dan terukur
			Penerapan pelayanan publik yang cepat, nyata, dan nyaman serta <i>zero complain</i> dari masyarakat
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2.2 Smart Branding

Smart Branding diimplementasikan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu *Branding* pariwisata, *Branding* bisnis, dan *Branding* wajah kota. Strategi pembangunan *Smart Branding* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Strategi Pembangunan *Smart Branding*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik pasaran (<i>Tourism Branding</i>)	Persentase peningkatan kunjungan wisata	- Pembuatan/ pengembangan wisata bertaraf nasional bahkan internasional sehingga mampu menarik wisatawan nusantara dan asing; - Pengembangan wisata berbasis potensi dan kebutuhan wisatawan; - Pembangunan masyarakat wisata dengan budaya ramah kepada pengunjung, ketersediaan <i>tour-guide</i>, dan pengenalan <i>tagline</i> “<i>boyolali smile of java</i>”.
		Persentase pengembangan kampung wisata kreatif	Pembentukan/ pengembangan desa wisata berbasis produk unggulan dan produk kreatif

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
2.	Terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik pasaran (<i>Business Branding</i>)	Prosentase produk unggulan daerah yang dipasarkan melalui <i>e-Commerce</i> dan <i>dashboard</i> Boyolali	Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan Boyolali melalui e-perdagangan
		Prosentase produk/jasa unggulan yang dikelola dengan bisnis baru	- Pembangunan dan pengembangan sistem pemasaran produk/jasa unggulan Boyolali seperti soto, abon, susu, dan lain-lain; - Pengenalan dan pengembangan sistem pemasaran produk/jasa industri kreatif seperti kuliner, kriya, <i>fashion</i>, digital, cinderamata, dan lain-lain.
3.	Terbangunnya wajah kota yang menarik pasaran (<i>City Appearance Branding</i>)	Jumlah bangunan khas dan mudah dikenal	Penataan kembali wajah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional
		Jumlah taman tematik	Pembangunan taman-taman tematik untuk memberikan ciri khas dan kesan Boyolali
		Jumlah bangunan ikon Boyolali	Pembangunan/pembuatan ikon-ikon

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
			Boyolali sebagai penanda seperti sapi, susu, lele, jagung, dan lain-lain
		Persentase pemuatan bangunan khas, taman tematik, dan bangunan ikonik di media digital	Pemasaran Boyolali di tingkat internasional sebagai kota yang nyaman dikunjungi, disinggahi, dan nyaman dihuni <i>for everybody</i> .

3.2.3 Smart Economy

Smart Economy pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah meliputi bidang investasi, penanaman modal, penegakan regulasi, penghapusan pungutan liar, jaminan waktu dan kualitas layanan serta pengembangan produk-produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses layanan publik di bidang perizinan, penanaman modal dan investasi serta pengembangan produk-produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Layanan digital berbasis perbankan pun akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pemerintah dengan asumsi semakin efektif transaksi dibangun secara non tunai, maka akan semakin kecil peluang dan tingkat kebocoran anggaran yang dapat terjadi. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Boyolali.

Smart Economy diimplementasikan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu industri yang berdaya saing, kesejahteraan masyarakat, dan transaksi keuangan. Strategi pembangunan *Smart Economy* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.3 Strategi Pembangunan *Smart Economoy*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Terbangunnya boyolali pro investasi dan ekosistem industri yang berdaya saing (<i>industry</i>)	Indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business/ EoD</i>)	- Peningkatan daya saing industri daerah pada <i>leading sector</i> industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (pertanian, peternakan, dan perikanan), industri sekunder (manufaktur, pengolahan, dan <i>packaging</i>), dan industri tersier (pasar produk daerah); - Pembangunan ekonomi yang kompetitif dan unggul dengan mengandung nilai-nilai kreatif, inovatif, dan kolaboratif - Pengembangan industri kreatif berbasis potensi daerah (susu, kopi, kesenian daerah, dan usaha mikro kecil dan menengah); dan - Pengembangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
			industri wisata agro (wisata pertanian/ panen padi, panen sayuran, olahan susu, dan wisata perikanan).
2.	Terwujudnya kesejahteraan rakyat berbasis produk unggulan daerah (<i>welfare</i>)	Produk unggulan daerah yang dikelola dengan model bisnis baru	- Pengembangan kegiatan ekonomi yang langsung berdampak pada kesejahteraan (<i>home stay</i> dan <i>local market</i>); - Peningkatan penyerapan angkatan kerja (<i>employment</i>); - Pengendalian inflasi daerah; - Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>empowerment</i>) antara lain melalui <i>one village one product</i>; dan - Peningkatan ketahanan pangan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal dan optimalisasi peran bumd sebagai penyangga kebutuhan pokok masyarakat.
3.	Terbangunnya	Pertumbuhan	- pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
	ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>) yang mudah dan cepat	transaksi keuangan secara elektronik	ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang <i>less cash</i>; - Peningkatan masyarakat yang <i>bankable</i> dan memiliki akses terhadap permodalan; - Pembangunan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>market place</i>; dan - Peningkatan kemudahan akses modal dan pelatihan pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengembangkan usahanya.

3.2.4 Smart Living

Smart living menunjukkan adanya pengelolaan lingkungan fisik dan sumber daya lingkungan yang cerdas, nyaman, efektif, dan efisien sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Smart living* ini merupakan dimensi *Smart City* yang paling erat dengan visi pembangunan *Smart City* dan tagline “*Smile of Java*”. Strategi umum yang perlu dilakukan untuk mewujudkan *Smart living* meliputi penerpaan pola tata ruang wilayah yang harmonis dan seimbang, pemenuhan kebutuhan air baku, lingkungan hunian yang bersih dan sehat, pemenuhan sarana prasarana dan kemudahan akses layanan kesehatan, serta menciptakan lalu lintas yang nyaman bagi masyarakat. Peran teknologi informasi dan komunikasi akan mempercepat dan mempermudah upaya mewujudkan *Smart living* di Boyolali.

Smart Living diimplementasikan dalam 4 (empat) unsur, yaitu tata ruang wilayah, pemenuhan air baku, sarana prasarana dan layanan kesehatan, serta lalu lintas. Strategi pembangunan *Smart living* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.4 Strategi Pembangunan *Smart Living*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman	Cakupan pemenuhan lahan ruang terbuka sesuai peruntukkan dan ketentuan	- Penataan dan pembangunan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perdagangan dan jasa yang didukung dengan fasilitas ruang terbuka hijau; dan - Penataan dan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
			pembangunan ruang publik daerah.
2.	Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat yang memadahi	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat	- Peningkatan cadangan air baku (pembuatan embung); - Peningkatan cakupan layanan air bersih, baik dari perusahaan penyedia air bersih maupun swadaya masyarakat; dan - Pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan dan pengolahan air bersih.
3.	Terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadahi serta lingkungan yang bersih dan sehat	Rasio jumlah penduduk dengan jumlah dokter dan jumlah puskesmas/ rumah sakit.	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan (<i>healthcare</i>)
		Cakupan ketersediaan sarana olah raga	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>)
		Persentase desa/kelurahan yang menerapkan budaya hidup bersih	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
4.	Terciptanya lalu	Penurunan tingkat	- peningkatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
	lintas yang nyaman bagi masyarakat	kemacetan lalu lintas	ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas (<i>mobility</i>) bagi orang dan barang; - Pemasangan rambu-rambu dan alat kelengkapan jalan sesuai standar; dan - Penataan parkir yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pengendara.

3.2.5 *Smart Society*

Smart Society diimplementasikan dalam 4 (empat) unsur, yaitu interaksi masyarakat, ekosistem belajar, keamanan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Strategi pembangunan *Smart society* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.5 Strategi Pembangunan *Smart Society*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Terwujudnya interaksi masyarakat yang efisien (<i>community</i>)	Pertumbuhan kelompok masyarakat kreatif	- Peningkatan interaksi sosial masyarakat antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
			(digital); - Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu maupun sosial dalam memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif; - Peningkatan kreativitas masyarakat boyolali (<i>boyolali creative</i>) dan kolaborasi antar komunitas (<i>co-working community</i>).
2.	Terbangunnya ekosistem belajar yang efisien (<i>learning</i>)	Cakupan sekolah berbasis TIK (<i>e-learning</i>)	Pengembangan pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi berkarakter Boyolali Masagi
		Persentase sekolah yang memiliki keunggulan	Pengembangan platform edukasi bagi masyarakat
3.	Terwujudnya sistem keamanan masyarakat (<i>security</i>)	Kecepatan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sistem keamanan masyarakat
		Persentase tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) kejadian kebakaran	Peningkatan sistem penanganan kebakaran
4.	Terwujudnya kesejahteraan	Cakupan Penyandang Masalah	Peningkatan penanganan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
	sosial masyarakat	Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3.2.6 Smart Environment

Smart Environment diimplementasikan dalam 3 (tiga) unsur, yaitu pengendalian kualitas lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, dan ruang terbuka hijau perkotaan. Strategi pembangunan *Smart environment* di Boyolali sebagai berikut :

Tabel 3.2.6 Strategi Pembangunan *Smart Environment*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
1.	Berkembangnya program pengendalian kualitas lingkungan (<i>protection</i>)	Baku mutu kualitas lingkungan, limbah, dan tingkat gangguan lingkungan	- Pengendalian dan pengembangan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara; - Pengintegrasian teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Things (IoT)</i> dan sensor kualitas udara; dan - Pengendalian alih fungsi lahan.
2.	Berkembangnya tata kelola sampah dan	Cakupan layanan pengelolaan sampah di TPA	Peningkatan layanan pengelolaan sampah di TPA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
	limbah (<i>waste</i>)	Persentase penurunan volume sampah	- Pengembangan sistem tata kelola sampah rumah tangga (<i>household</i>), industri (<i>industrial</i>), dan aktifitas publik (<i>public</i>); - Peningkatan peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> untuk melakukan pengelolaan sampah; - Pengembangan kerjasama dan teknologi pengelolaan sampah; dan - Penegakan peraturan pengelolaan sampah.
		Persentase industri kecil yang memiliki sarana pengolahan air limbah	Peningkatan peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> untuk melakukan pengelolaan limbah
3.	Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase kecamatan yang memiliki ruang terbuka hijau publik (taman kota)	Pemenuhan pembangunan tiap kecamatan memiliki ruang terbuka hijau publik yang nyaman;
		Persentase ruang terbuka hijau	Penaatan ketentuan prosentase ruang terbuka minimal yang wajib dimiliki oleh usaha/kegiatan

BAB IV. RENCANA AKSI *SMART CITY* BOYOLALI

Pelaksanaan pembangunan *Smart City* di daerah memerlukan dukungan kesiapan antara lain berupa meliputi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur pendukung, aplikasi dan perangkat lunak pendukung dan literasi *Smart City*.

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Boyolali

Kebijakan *Smart City* Boyolali tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan beberapa keputusan serta surat edaran yang berhubungan dengan pelaksanaan *Smart City* di Boyolali. Pengembangan kebijakan *Smart City* Boyolali antara lain:

1. Menuangkan kebijakan *Smart City* Boyolali dalam peraturan daerah sehingga lebih mempunyai kekuatan hukum dan mengikat semua pihak, termasuk lembaga lain, dunia usaha (swasta), maupun masyarakat. Harapannya dengan adanya peraturan daerah tentang *Smart City*, pelaksanaan *Smart City* akan lebih cepat dan menyeluruh di semua aspek serta berkelanjutan meskipun berganti kepemimpinan.
2. Sosialisasi kebijakan *Smart City* Boyolali (*Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* Boyolali lima tahun ke depan. Kebijakan dalam *Master Plan* ini merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya dan melaksanakan kebijakan baru menyesuaikan arah perkembangan dan kebutuhan nyata *stakeholder*. Antara lain merubah arah kebijakan *Smart City* yang semula terpusat pada *Smart Government* menjadi berorientasi ke semua dimensi *Smart City*, yaitu *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*.

3. Menyusun pedoman teknis dan perencanaan teknis *Smart City* agar pelaksanaan *Smart City* dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat antara lain penyusunan *roadmap e-Government*, *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan *e-Government*, dan penyusunan *e-Government Interoperability Framework* (e-GIF). e-GIF merupakan skema untuk memastikan antar-operasi sistem berbasis komputer;
4. Menyinkronkan *Master Plan Smart City* dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sinkronisasi ini menjamin perencanaan *Smart City* dapat dibiayai dan dilaksanakan sehingga target kinerja yang diinginkan terpenuhi.

Kelembagaan *Smart City Boyolali* selama ini antara lain terdiri dari Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*. Pengembangan Dewan *Smart City* akan melibatkan banyak pihak di luar instansi pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas arah pelaksanaan *Smart City* dan meningkatkan peran para pihak dan instansi/lembaganya. Sedangkan pengembangan tim pelaksana *Smart City* dengan mengganti, menambah dan atau mengurangi personil anggota tim menyesuaikan keaktifan dan intensitas tugas pekerjaan yang berhubungan dengan *Smart City*. Harapan pengembangan tim pelaksana ini adalah terbentuk tim yang efektif melaksanakan *Smart City* di dimensi *Smart City* dan lembaga/instansi masing-masing.

Kelembagaan lain yang akan dikembangkan adalah pembentukan Agen TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di semua perangkat daerah dan unit pelaksana teknis. Agen tim ini bertugas mengumpulkan data dan informasi mengenai *Smart City* di lingkungan kerja masing-masing dan menginisiasi/membantu/memfasilitasi pelaksanaan *Smart City* serta mendampingi personil aparatur yang mengoperasikan aplikasi/sistem informasi berbasis elektronik. Selain itu dibentuk pula forum TIK yang beranggotakan

personil-personil yang membidangi dan mempunyai motivasi untuk membangun/mengembangkan *Smart City* Boyolali.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

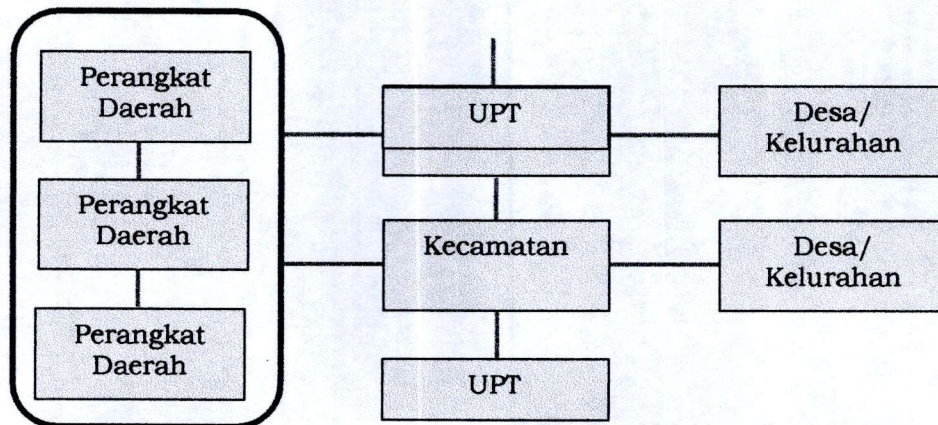
Infrastruktur pendukung *Smart City* terdiri dari infrastruktur fisik dan infrastruktur digital. Infrastruktur fisik berupa jalan dan jembatan, terminal, drainase, trotoar, area publik, listrik, air bersih, persampahan dan air limbah. Sedangkan infrastruktur digital berupa jaringan kabel fiber optik (FO), tower radio (penerima dan pengirim frekwensi/sinyal), wifi publik dan tower menara telekomunikasi.

Rencana pengembangan infrastruktur fisik meliputi jalan dan jembatan, terminal, drainase, trotoar, area publik, listrik, air bersih, persampahan dan air limbah. Pembangunan infrastruktur fisik ini harus dilakukan guna mendukung penerapan *Smart City*, yaitu pengelolaan sumber daya secara cerdas sehingga efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Rencana pengembangan infrastruktur digital meliputi jaringan fiber optik, tower radio, tower telekomunikasi, data center, wifi publik dan infrastruktur cerdas. Berikut uraian infrastruktur digital:

1. Pengembangan jalur kabel fiber optik

Jalur kabel fiber optik dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Saat ini jalur FO sudah dibangun di dalam wilayah perkotaan yang menghubungkan sebagian besar kantor pemerintah daerah dan titik-titik strategis yang rencanya akan dipasang CCTV, Wifi Publik dan infrastruktur cerdas lainnya. Sedangkan radio dipasang di sebagian besar kantor kecamatan dan semua kantor kepala desa/kelurahan. Beberapa kantor kecamatan, kelurahan, dan desa telah tersambung dengan kabel FO milik penyedia jasa internet. Guna menjamin kelancaran konektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, semua kantor perangkat daerah dan kantor pemerintah desa secara bertahap akan diupayakan tersambung dengan jaringan FO.



Gambar 4.1 Rancana Pemenuhan Jaringan fiber optik

2. Penyediaan tower radio

Penyediaan jaringan internet melalui menara (tower) penerima dan pengirim frekuensi/sinyal) dilakukan bagi kantor kecamatan/ UPT/kelurahan/desa di area yang tidak ada jaringan kabel fiber optik. Penyediaan menara ini secara bertahap akan dikurangi seiring dengan pengembangan jaringan fiber optik di semua kantor pemerintah daerah dan pemerintah desa. Penyediaan menara juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program/kegiatan tertentu secara insidentil yang membutuhkan dukungan internet besar.

3. Peningkatan akses telekomunikasi (sinyal)

Peningkatan akses telekomunikasi (sinyal) ini dilakukan dengan mengarahkan operator-operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren dan operator lainnya agar mendirikan telekomunikasi di daerah pelosok dan area *blank spot*. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat Boyolali dapat memperoleh akses telpon dan internet sehingga dimanapun dapat melakukan transaksi elektronik sesuai kebutuhan perkembangan zaman.

4. Pembangunan dan pengembangan *Data Center*

Data Center secara fisik merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk menyimpan server dan dilengkapi berbagai pengamanan penunjang antara lain pendingin ruang, sistem pemadam kebakaran, sistem penyediaan energi serta sistem koneksi yang menjamin keamanan *server* dan data yang tersimpan. Sedangkan *Data Center* dapat pula sebagai pusat data, yaitu terkumpulnya data-data yang terlibat dalam transaksi elektronik. Semua data-data yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat disimpan di *Data Center* yang di kelola Diskominfo yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan informasi.

5. Pengembangan wifi publik

Rencana wifi publik (akses internet gratis) disediakan di kantor-kantor pemerintah daerah, area publik daerah, kantor pemerintah desa, dan lain-lain lokasi strategis yang memerlukan dukungan akses internet, masyarakat yang berkepentingan dapat mengakses internet gratis. Upaya ini bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi elektronik, baik berupa *chatting*, jual-beli *online*, mengirim/menerima dokumen, dan lain-lain juga meningkatkan literasi masyarakat dalam hal TIK/ *Smart City* .

6. Pengembangan infrastruktur cerdas

Infrastruktur cerdas merupakan perangkat keras yang terhubung dengan sistem yang dipasang di titik-titik strategis yang berfungsi menerima respon lingkungan dan atau menerima perintah dari sistem untuk menyajikan data/ informasi lingkungan dan atau melakukan aktivitas. Infrastruktur cerdas yang rencananya akan digunakan antara lain CCTV, IoT (*Internet of Things*), sensor kualitas lingkungan, *Smart Lamp* dan lain-lain.

4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*

Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart City* dilaksanakan dengan memperbaiki dan/atau mengembangkan aplikasi-aplikasi yang digunakan, mudah dioperasikan, dan bermanfaat serta membangun aplikasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja *Smart City*. Beberapa aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang ada, dikembangkan dan dibangun sebagai berikut:

1. Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan

Aplikasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada, dikembangkan dan dibangun dalam penyelenggaraan pemerintah dikelompokkan dalam beberapa aplikasi yang merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang selalu/berkala dilakukan, sehingga diperlukan cara aplikasi dan berbasis elektronik (internet) untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. Beberapa aplikasi dikelompokkan dalam *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monitoring* dan evaluasi, e-kinerja, e-presensi pegawai, e-pengawasan, e-office, e-tunjangan, dan lain-lain. Penamaan aplikasi-aplikasi menyesuaikan nama yang sudah ada/ familiar dan atau nama yang mudah diingat, antara lain Simda Keuangan, Simda Pendapatan, dan Sipad termasuk *e-budgeting*, Sibangun untuk *e-planning*, dan lain-lain.

2. Aplikasi pelayanan publik

Aplikasi pelayanan publik yang ada, dikembangkan, dan dibangun dalam pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa aplikasi yang merupakan proses pelayanan publik yang selalu/berkala dilakukan, sehingga diperlukan cara aplikasi dan berbasis elektronik (internet) untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. Beberapa aplikasi dikelompokkan dalam e-pelayanan kependudukan, e-pelayanan perizinan, e-pelayanan administrasi pemerintahan, e-pelayanan kesehatan, e-pelayanan

pendidikan, e-pelayanan pengaduan, e-pelayanan informasi publik, dan lain-lain.

Aplikasi-aplikasi yang sudah dan akan dibangun berbasis web dan dapat diakses dengan android. Aplikasi berbasis web menggunakan domain resmi boyolali.go.id dan sub domain xxxxx.boyolali.go.id dalam dashboard boyolali.go.id (*single dashboard*) dimaksudkan agar memudahkan semua pihak yang berkepentingan mencari dan mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan aplikasi dikembangkan sehingga dapat diakses dengan android dimaksudkan untuk memudahkan semua pihak mengakses aplikasi-aplikasi tersebut kapanpun dan dimanapun.

Sebagian besar aplikasi-aplikasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri. Beberapa sudah diintegrasikan antara lain Simda Keuangan (*e-Budgetting*) dan Sibangun (*e-Planning*). Integrasi sistem/aplikasi ini maksudkan agar proses pekerjaan yang saling berhubungan/saling membutuhkan dapat terhubung satu dengan yang lain, sehingga antar sistem/aplikasi dapat “berkomunikasi” secara langsung (tidak secara manual). Komunikasi langsung ini akan menghemat waktu (mempercepat proses pekerjaan) dan menghindari kesalahan data suatu sistem dengan sistem yang lain.

Secara bertahap aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan. Guna memetakan kebutuhan integrasi antar sistem disusun *e-Government Interoperability Framework* (e-GIF), yaitu skema untuk memastikan antar-operasi sistem berbasis komputer. Disamping itu dengan adanya integrasi ini perpindahan data dari satu sistem ke sistem lain setelah melalui standarisasi metadata.

Single Data System (SDS) akan dibangun secara berkelanjutan agar data-data pemerintah daerah merupakan data tunggal dan valid, karena yang menerbitkan lembaga yang berwenang dan prosesnya sesuai prosedur dan ketentuan. Dengan *Single Data System* ini pengelolaan data akan lebih baik, pencarian data akan lebih mudah dan cepat, penyajian basis data lebih baik, bisa diakses dengan mudah dan valid. Masyarakat juga dapat mengakses dengan

mudah, khususnya data-data yang sifatnya sudah terbuka (*open data*).

Pengamanan aplikasi/sistem informasi berbasis internet dilakukan karena pada dasarnya jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain melalui internet, data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain yang memberi kesempatan pada user atau pihak lain untuk mengambil alih satu atau beberapa komputer sebagai pengganggu. Permasalahan pokoknya dalam keamanan sistem informasi terletak pada kelemahan dan ancaman atas sistem informasi yang pada gilirannya permasalahan tersebut akan berdampak kepada resiko dan berdampak pada sistem informasi terkait dengan efektifitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan dan keandalan. Oleh karena itu keamanan sistem informasi menjadi keharusan bagi pemerintah daerah yang melaksanakan *e-Government* dan membangun/mengembangkan *Smart City*.

4.4 Rencana Penguatan Literasi *Smart City* Boyolali

Literasi *Smart City* bagi masyarakat Boyolali akan mempengaruhi tingkat partisipasi, pencapaian dan kematangan *Smart City* Boyolali. Literasi *Smart City* adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan membangun *Smart City*. Kemampuan untuk melakukan hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat menjadi sadar (melek) tentang cara *Smart City* dibangun dan diakses. Semakin tinggi literasi *Smart City* masyarakat akan semakin paham, semakin matang dan semakin bijak dalam pembangunan *Smart City* dalam memanfaatkan TIK. Kegiatan-kegiatan penguatan literasi *Smart City*, yaitu:

1. Sosialisasi *Smart City*

Sosialisasi *Smart City* melalui website pemerintah daerah (boyolali.go.id dan website perangkat daerah), media sosial (*Facebook*, *Whatsapps*, *Instagram*, *Youtube* dan lain-lain), media cetak (majalah dan surat kabar), media elektronik (radio dan televisi), surat edaran, rapat-rapat, leaflet, baliho dan lain-lain.

2. Pembinaan penerapan *Smart City*

Pembinaan penerapan *Smart City* dilakukan di perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan selain untuk mendorong penerapan *Smart City* berjalan lebih dan lebih cepat, juga untuk mengedukasi para pihak dalam penerapan *Smart City*.

3. Pembentukan forum *Smart City*

Forum *Smart City* ini beranggotakan personil dari berbagai unsur pelaku *Smart City*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Forum *Smart City* ini beranggotakan personil yang berlatar belakang TIK dan atau yang memiliki semangat untuk membangun *Smart City* Boyolali. Forum ini secara berkala mengadakan pertemuan membahas *Smart City* dan pengelolaan TIK di Kabupaten Boyolali.

4. Penyediaan layanan *Helpdesk Smart City*

Layanan *helpdesk Smart City* ini dilaksanakan dengan membentuk tim dan alamat *helpdesk* serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan *Smart City* dan pengelolaan TIK. Personil dari perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dapat memperoleh layanan *Smart City* dan pengelolaan TIK sesuai yang dimohonkan kepada tim *helpdesk*.

5. Penghargaan *Smart City*

Pemberian penghargaan dilakukan melalui penilaian, lomba atau kontes *Smart City* dilakukan antara perangkat daerah (termasuk unit pelaksana teknis), desa, dunia usaha dan masyarakat. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan penerapan *Smart City* dan pengelolaan TIK di lingkungan kerja masing-masing serta memberikan apresiasi atas keberhasilannya.

Berikut rencana aksi (kesiapan) *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 berisi rencana kerja pembangunan *Smart City* meliputi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perangkat lunak dan literasi *Smart City* sebagai berikut:



Tabel 4.1 Rencana Aksi *Smart City* Boyolali 2019-2023

Rencana aksi	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kebijakan					
Penyusunan Peraturan daerah tentang <i>Smart City Boyolali</i>	Penyusunan rancangan peraturan daerah	Penetapan peraturan daerah dan sosialisasi	Penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah		Penyusunan perbaikan peraturan daerah
Penyusunan/ revisi peraturan bupati tentang <i>Smart City</i>	Penyusunan peraturan bupati	Sosialisasi dan penerapan peraturan bupati	Penerapan dan evaluasi penerapan peraturan bupati		Penyusunan perbaikan peraturan bupati
Sosialisasi perubahan arah kebijakan <i>Smart City Boyolali</i> dan evaluasi pelaksanaan	Sosialisasi regulasi <i>Smart City</i>	Evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kebijakan <i>Smart City Boyolali</i>			
Menyusun pedoman teknis pelaksanaan <i>Smart City</i>	SOP layanan e-Government dan Pedoman pelaksanaan <i>Smart City</i>				
Menyinkronkan perencanaan <i>Smart City (Master Plan)</i> dengan dokumen perencanaan daerah lainnya	Koordinasi dalam penyusunan RKPD dan Renja		Koordinasi penyusunan RPJMD dan Renstra	Koordinasi dalam penyusunan RKPD dan Renja	
2. Kelembagaan					
Dewan <i>Smart City</i>	penyusunan revisi keputusan bupati tentang dewan <i>Smart</i>	Pelaksanaan rapat secara berkala			

Rencana aksi	2019	2020	2021	2022	2023
	City				
Tim pelaksana Smart City	penyusunan revisi keputusan bupati tentang dewan Smart City	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Smart City di perangkat daerah			
Agan TIK	penyusunan revisi keputusan bupati tentang dan pembekalan Agen TIK	Pelaksanaan Smart City di perangkat daerah			
Forum TIK	Pembentukan forum TIK	Pelaksanaan rapat secara berkala			
3. Infrastruktur					
Pengembangan jalur kabel fiber optik (FO)	Pemasangan jalur fiber optik (FO) perangkat daerah dan kecamatan	Pemasangan jalur fiber optik (FO) kecamatan	Fasilitasi pemasangan jalur fiber optik (FO) desa		
Penyediaan tower radio	Layanan suplei internet pada lokasi yang belum ada kabel fiber optik (FO) dan tower telekomunikasi				
Peningkatan akses telekomunikasi (sinyal)	Koordinasi penentuan titik pendirian tower telekomunikasi				
Pembangunan dan pengembangan data center	Pengembangan peralatan data center	Pengembangan peralatan dan sertifikasi data center	Pengembangan peralatan dan dan optimisasi pemanfaatan data center		
Pengembangan wifi publik	Pemasangan wifi publik daerah, kantor pemerintahan daerah, dan layanan suplei	Layanan suplei internet untuk kegiatan/ program tertentu dan fasilitas pemasangan wifi publik desa	Layanan suplei internet untuk kegiatan/ program tertentu		

Rencana aksi	2019	2020	2021	2022	2023
	internet untuk kegiatan/ program tertentu				
Pengembangan infrastruktur cerdas	Pemasangan CCTV di titik strategis	Pemasangan CCTV di titik strategis, sensor kualitas lingkungan, <i>Smart lamp</i> , dan IoT (<i>Internet of Thing</i>)			
4. Aplikasi					
<i>City Operation Center (COC)</i>	Pembangunan <i>City Operation Center</i>	Pengembangan dan pemanfaatan <i>City Operation Center</i>			
Integrasi sistem informasi	Membangunan integrasi sistem informasi <i>e-Government</i> dan e-layanan	Memelihara dan mengembangkan integrasi sistem informasi <i>e-Government</i> dan e-layanan			
<i>Single data system</i>	Membangun <i>single data system</i>	Memelihara dan mengembangkan <i>single data system</i>			
Pengembangan <i>e-Government</i>	Membangunan dan mengembangkan penyelenggaraan <i>e-Government</i>				
Pengembangan e-layanan	Membangunan dan mengembangkan penyelenggaraan e-layanan				
5. Penguatan literasi <i>Smart City</i>					
Publikasi <i>Smart City</i>	Publikasi <i>Smart City</i>				
Pembinaan penerapan <i>Smart City</i>	Pembinaan penerapan <i>Smart City</i> perangkat daerah	Pembinaan penerapan <i>Smart City</i> kecamatan	Pembinaan penerapan <i>Smart City</i> UPT	Pembinaan penerapan <i>Smart City</i> desa	Pembinaan penerapan <i>Smart City</i> sekolah
Pembentukan forum <i>Smart City</i>	Pembentukan forum <i>Smart City</i>	Pertemuan rutin dan insidental forum			
Penyediaan	Layanan <i>help desk</i>				



Rencana aksi	2019	2020	2021	2022	2023
layanan <i>help desk Smart City</i>					
Penilaian <i>Smart City</i>	Penilaian antar perangkat daerah	Penilaian antar kecamatan	Penilaian tingkat UPT	Penilaian antar desa	Penilaian antar sekolah



BAB V. PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* BOYOLALI

Pembangunan *Smart City* Boyolali 2019-2023 merupakan rangkaian dari pembangunan *Smart City* sebelumnya, bahkan sejak mulai penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 dan penerapan Simda Keuangan pada tahun 2006 pada saat infrastruktur jaringan internet sangat terbatas. Proses perkembangan *Smart City* berjalan lambat sampai dengan pertengahan tahun 2016. Pada rentang waktu itu sudah pernah membangun infrastruktur internet di seluruh kecamatan dengan menggunakan radio (tower) pada tahun 2005-2006, pengadaan jaringan LAN (*Local Area Network*) dan jaringan fiber optik (FO) di sebagian kompleks perkantoran tahun 2016. Sistem informasi/aplikasi juga berkembang antara lain Sistem Informasi Daerah (Simda) Keuangan, Sistem Informasi Daerah (Simda) Barang, Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), web boyolalikab.go.id, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), e-pengaduan, *e-Office*, dan masih banyak lagi sistem informasi/aplikasi.

Istilah *Smart City* di Kabupaten Boyolali muncul pada pertengahan tahun 2016 bertepatan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Sebelumnya pembangunan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggunakan istilah *e-Government* dan saat ini pun masih digunakan. Dalam pengertian *Smart City* saat ini, *e-Government* adalah *Smart Government* yang merupakan salah satu dimensi dari 6 (enam) dimensi *Smart City*. Pada tahap awal penerapan *Smart City* ini *e-Government* atau *Smart Government* merupakan dimensi utama *Smart City* dan menjadi pilar dan mendorong pelaksanaan dimensi *Smart City* lainnya. Peta jalan *e-Government* merupakan bagian (irisan) dari *Smart City*.

Peta jalan pembangunan *Smart City* Boyolali berisi rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 untuk mencapai tujuan pembangunan *Smart City* Boyolali. Peta jalan pembangunan *Smart City* Boyolali terdiri dari rencana aksi *Quick Wins* dan rencana

program/kegiatan pembangunan *Smart City* yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Peta jalan pembangunan *Smart City* Boyolali ini berisi rencana kerja baru akan dilaksanakan tahun 2019-2023, namun dalam pelaksanaan *Smart City* secara keseluruhan juga merupakan kelanjutan dan pengembangan program/kegiatan yang sudah berjalan sebelum tahun 2019, termasuk sistem informasi/aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Boyolali selama ini.

5.1 Rencana Aksi *Quick Win Smart City* Boyolali Tahun 2019

Rencana Aksi *Quick Wins* Pengembangan *Smart City* Boyolali Tahun 2019 berisi kegiatan pembangunan *Smart City* yang dapat dilaksanakan tahun 2019, hasilnya langsung dapat dirasakan dan mampu menjadi pemantik (pemicu) pelaksanaan pembangunan *Smart City* lainnya. Adanya rencana aksi *Quick Wins* ini diharapkan pelaksanaan kebijakan pembangunan *Smart City* yang merupakan pembangunan jangka panjang sebagian dapat segera dirasakan hasilnya dan mampu menunjukkan keberadaan *Smart City*. Rencana Aksi *Quick Wins* meliputi semua (enam) dimensi *Smart City*.

Berikut Rencana Aksi *Quick Wins* Pengembangan *Smart City* Boyolali Tahun 2019:

Tabel 5.1 Rencana Aksi *Quick Wins* Pembangunan *Smart City Boyolali* Tahun 2019

No.	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. <i>Smart Governemnet</i>								
1.	Masyarakat (Mesin Aplikasi Pelayanan Rakyat)	Mempercepat dan mempermudah proses layanan	Masyarakat	Tidak adanya praktik pungli dan terpenuhinya dokumen yang dibutuhkan masyarakat	Disdukcapil dan Desa/ Kelurahan	APBD	Disdukcapil dan Desa/ Kelurahan	Penyedia jasa pembuatan aplikasi dan Disdukcapil
2.	Sistem Informasi "Boyolali Saat Ini"	Mengetahui data/ informasi dan kondisi Kabupaten Boyolali Real Time	Boyolali memiliki sistim yang mampu memantau titik strategis, mengetahui data/ informasi, dan mengetahui interaksi masyarakat Boyolali	Terbentuknya sistem informasi yang mampu menunjukkan aktivitas, data/ informasi serta opini Boyolali	Diskominfo	APBD	Diskominfo, Satpol PP, dan Dishub	Penyedia pembuat sistem informasi dan masyarakat
B. <i>Smart Branding</i>								
1.	Penerapan SMS Gateway Boyolali	Meningkatkan informasi daya tarik Boyolali kepada masyarakat	Terbentuknya sistem SMS Gateway Boyolali	Masyarakat memperoleh SMS pengenalan Boyolali	Disporapar	APBD Kabupaten	Disporapar	Penyedia jasa pembuatan sistem
2.	Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal di setiap kecamatan	Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal bidang pariwisata	Terwujudnya objek wisata unggulan di setiap kecamatan sesuai potensi	Meningkatnya kunjungan wisata di desa wisata	Desa, Disporapar, Disdagperin, Dispertan, Disnakkan, Diskominfo, dan PT. Telkom	APBD dan APBDes	Desa, Disporapar, Disdagperin, Dispertan, Disnakkan, Diskominfo, dan PT. Telkom	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Perusahaan Perseroan Terbatas

No.	Program Kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Lomba "Boyolali Smile of Java"	Menanamkan dan memahami "Boyolali Smile of Java" bagi Aparatur pemerintah daerah dan masyarakat	Aparatur pemerintah daerah dan masyarakat memahami falsafah "Boyolali Smile of Java"	Aparatur pemerintah daerah dan masyarakat menerapkan "Boyolali Smile of Java"	Disporapar	APBD Kabupaten	Disporapar, Perangkat Daerah, dan masyarakat	Perusahaan Perseroan Terbatas
C.	Smart Economy							
1.	Pasar Boyolali Online (Market Boyolali, Mr. Boy)	Meningkatkan kemudahan interaksi dan aktivitas jual beli di antara masyarakat Boyolali	Terbentuknya sistem informasi Pasar Boyolali Online	Sistem informasi dapat masyarakat untuk melakukan jual beli produk masyarakat secara online	Disdagperin/ Diskominfo	APBD	Disdagperin, Diskominfo	Penyedia jasa pembuatan aplikasi Masyarakat
2.	Peningkatan sistem monitoring ternak sapi (SIMAPI/ E-KTP Sapi)	Meningkatkan pendataan identitas dan kondisi sapi di Boyolali	Terbentuknya sistem informasi monitoring sapi Boyolali (SIMAPI)	Tersusunnya data identitas dan kondisi ternak sapi dan kondisinya secara digital	Disnakan dan Diskominfo	APBD	Disnakan dan Diskominfo	Penyedia jasa pembuatan sistem informasi
D.	Smart Living							
1.	Penerapan sistem informasi Sahabat Ibu Sehati (Satiti)	Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi	Terbentuknya sistem informasi terintegrasi Sahabat Ibu Sehati (Satiti)	Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menurun	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, bidang desa, masyarakat

E.	<i>Smart Society</i>							
1.	<i>Fire Call and Rescue</i> (peningkatan respon penanganan kebakaran)	Meningkatkan kecepatan respon penanganan laporan kebakaran	Terbentuknya sistem informasi penanganan laporan	Kecepatan respon penanganan laporan kebakaran sesuai ketentuan	Satpol PP dan Diskominfo	APBD	Satpol PP dan Diskominfo	Penyedia pembuatan sistem informasi, pemerintah desa, dan masyarakat
2.	Pembentukan pasukan Unit Reaksi Cepat (URC) <i>mobile</i> gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	Memberikan layanan penanganan/ respon laporan pelanggaran peraturan daerah dan gangguan ketertiban dengan cepat	Terbentuknya tim/pasukan yang mampu Memberikan layanan penanganan/ respon laporan pelanggaran peraturan daerah dan gangguan ketertiban dengan cepat,	Tindak lanjut laporan 1 x 24 jam dan terlayani Seluruh Pengaduan Masyarakat	Satpol PP	APBD	Satpol PP	Perangkat daerah, lembaga terkait dan masyarakat
F.	<i>Smart Environment</i>							
1.	Pembangunan Bank Sampah Terintegrasi (Bank Santri)	Mengurangi sampah pada sumbernya dan meningkatkan pengelolaan sampah lebih efektif	Masyarakat mempunyai bank sampah yang pengelolaannya terintegrasi dengan bank sampah lainnya	Terbentuknya bank sampah di setiap RT dan sistem terintegrasi dengan bank sampah lainnya	DLH, Pemerintah Desa	APBD, APBDes	DLH, Pemerintah Desa	Dinas Kesehatan, CSR Perusahaan, LSM Peduli lingkungan
2.	Taman Pojok Energi Baru Terbarukan	Menyediakan teknologi pengelolaan energi baru dan terbarukan	Masyarakat memahami dan mengapresiasi usaha pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Terbentuknya Taman Pojok Energi Baru Terbarukan				

5.2 Peta Jalan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023

Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 berisi indikasi program/kegiatan pembangunan *Smart City* yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dari tahun 2019-2023. Nama program/kegiatan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya. Peta jalan ini juga berisi indikator kinerja yang menunjukkan kondisi yang diinginkan dari pembangunan *Smart City* sesuai tahapan.

Berikut Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023:

Tabel 5.2 Peta Jalan Pembangunan *Smart City Boyolali* Tahun 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	<i>Smart Government</i>											
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel	Index Penyelenggaraan e-Government	penyederhanaan alur penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan sistem yang terintegrasi	Integrasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan (perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan kinerja)	Integrasi aplikasi/ sistem informasi (basis data/ aplikasi)	1	3	5	8	10	Perencanaan dan keuangan	Diskominfo dan PD terkait
				Penerapan e-LKPJ/LPPD	Penerapan Aplikasi	70%	80%	90%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda
				Single Data System dan Open Data System	Prosentase data yang masuk Single Data System	25%	50%	75%	100%	100%	Statistik	Diskominfo dan PD terkait

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Database Kerjasama	Penerapan Aplikasi	25%	75%	100%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda
				SINANGKIS (Sistem Imformasi Penanggulangan kemiskinan)	Data penemima dan realisasi anggaran yang valid	85%	100%	100%	100%	100%	Sosial	BP3D
				e-presensi	Perangkat Daerah yang menerapkan e-presensi	100%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian	BKP2D
				SIM KERJA MAS (Sistem Informasi Kinerja Puskesmas)	Penerapan Aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes (Puskesmas)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				SIMONEV PBJ (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa)	Penerapan Aplikasi	50%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
				SIHORE (<i>System Human Resource</i>)	Penerapan sistem informasi	50%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian	BKP2D
				SIP (Sistem Informasi Pertanahan)	Penerapan sistem informasi pertanahan di wilayah Kab. Boyolali	50%	100%	100%	100%	100%	Pertanahan	DPUPR/Desa / Kelurahan
				APEM (Aplikasi Pelayanan Masyarakat)	Kelurahan yang menerapkan aplikasi	1%	2%	5%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Desa/

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					pelayanan masyarakat mandiri							Kelurahan
				Rekam Medik Digital	Aplikasi database rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes/ RSUD
				Mobile Simpeg	Cakupan pegawai yang menggunakan aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian	RSUD Simo
				Pengembangan SIPAD (Sistem Informasi Pajak Daerah).	Cakupan layan pajak dalam SIPAD	100%	100%	100%	100%	100%	Keuangan	BKD
				Aplikasi Pesan Ambulans onLine	Cakupan rumah	25%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes/ RSUD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				(APAL)	sakit							
				Sistem Informasi Rincian biaya Rawat InaP Rumah Sakit (SIRRIP-RS)	Cakupan biaya rawat inap (harian) dalam sistem	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes/ RSUD
				Sistem Pengingat Rawat Jalan Pasien Rumah Sakit (SIPERAJAL-RS)	Cakupan pasien yang menerima layanan pengingat	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes/ RSUD
				Sistem informasi terintegrasi SATTI (Sahabat ibu sehati)	Cakupan informasi yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes/ Puskesmas

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Dashboard RSUD Simo	Penerapan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	RSUD Simo
		Cakupan penyediaan informasi publik	peningkatan keterbukaan informasi publik	Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	Cakupan perangkat daerah yang menyajikan dokumen dalam Web PPID	50%	100%	100%	100%	100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo dan PD terkait
				Papan informasi online kecamatan	Cakupan papan informasi online kecamatan	50%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan umum	Kecamatan
		Nilai akuntabilitas kinerja	peningkatan akuntabilitas dalam	Penerapan e-kinerja	Aplikasi	50%	100%	100%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Organisasi Setda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pemerintah	penyelenggaraan pemerintah									
2.	Terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi bidang TIK	peningkatan kualitas dan kuantitas Kepegawaian di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Pengadaan SDM bidang TIK	Prosentase pegawai yang memiliki latar belakang TIK	2%	3%	4%	5%	6%	Kepegawaian	BKP2D dan PD
				Pendidikan dan pelatihan SDM bidang TIK	Prosentase perangkat daerah yang SDM nya mengikuti Diklat bidang TIK	100%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian	BKP2D dan PD
		Prosentase perangkat	peningkatan penggunaan	Penerapan aplikasi/ sistem	Prosentase perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	Komunkasi dan	Diskominfo dan PD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		daerah selalu mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	sistem informasi yang <i>user friendly</i> dengan <i>security system</i> yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	informasi berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	daerah selalu mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik						Informatika	terkiat
		Prosentase perangkat daerah yang melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	peningkatan tatakelola birokrasi yang adaptif-inovatif terhadap perkembangan dan kondisi lingkungan serta kebutuhan publik.	Lomba inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan perangkat daerah yang mengikuti	25%	50%	75%	100%	100%	Pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi Setda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan an pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	peningkatan layanan publik yang transparan dan terukur	Evaluasi kinerja pelayanan publik	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0	Pemerintahan umum	Bagian Organisasi Setda
				Penerapan aplikasi sistem informasi pelayanan publik yang bisa diakses publik (<i>tracking system</i>)	Sistem informasi " <i>tracking system</i> "	100%	100%	100%	100%	100%	Penanaman modal	DPMPTSP
				Penerapan aplikasi sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik (sistem informasi perizinan	Sistem informasi perizinan online "Sipo"	100%	100%	100%	100%	100%	Penanaman modal	DPMPTSP dan PD terkait

2

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				online/ Sipol								
				Integrasi sistem informasi/ data kependudukan	Cakupan layanan integrasi sistem informasi/ data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
				Pengembangan pengelolaan perpustakaan secara elektronik dan terintegrasi	Penerapan INLIS Lite (<i>Integrated Library System</i>)	75%	100%	100%	100%	100%	Kearsipan dan Perpustakaan	Disarpus
			peningkatan peran serta masyarakat dalam	Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan	Peran serta masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%	Pemerintahan umum	PD/ UPT penyelenggara pelayanan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			penyelenggaraan pelayanan publik.	pelayanan publik								publik
B. <i>Smart Branding</i>												
1.	terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik pasaran (<i>tourism Branding</i>)	Prosentase peningkatan kunjungan wisata	- pembuatan/ pengembangan wisata bertaraf nasional bahkan internasional sehingga mampu menarik wisatawan nusantara dan asing; - pengembangan wisata berbasis potensi dan kebutuhan wisatawan;	BECRAFT Boyolali (Gebyar Ekraf Boyolali)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
				Kerjasama Kota Kreatif Indonesia (CCN Boy)	Jumlah kabupaten/ kota yang kerjasama	7	7	7	7	35	Pariwisata	Disporapar
				Festival Boyolali Tersenyum via Sosmed (Mesem)	kegiatan	1	-	1	-	1	Pariwisata	Disporapar
				Tagline Boyolali Smile of Java di masing-masing Kantor Pemerintahan, Fasilitas Publik ,	Jumlah tagline	-	47	-	-	267	Pariwisata	Disporapar

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			- pembangunan masyarakat wisata dengan budaya ramah kepada pengunjung, ketersediaan <i>tour-guide</i> , dan <i>pengelanaan tagline "Boyolali Smile of Java"</i> .	Objek Wisata								
				Mengadakan Lomba Senyum setiap Tahun untuk mengenalkan Boyolali Smile of java (<i>smile boy</i>)	kegiatan	1	-	1	-	1	Pariwisata	Disporapar
				Membangun <i>Sport Tourism</i> di Paras Cepogo (<i>Sport Tourism Boy</i>)	Sport tourism	1	1	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
				Event Gokart di Mojosoongo Tahunan (gokart boy)	kegiatan	1	1	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
				Membangun Wahana Wisata seperti	Wahana wisata	-	-	1	1	1	Pariwisata	Disporapar

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Disneyland (Disneyland Boy)								
				Membangun Kereta Gantung (Cable Car Boy)	Wahan kereta gantung	1	1	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
				Pengembangan/ pemanfaatan potensi wisata selancar pasir di lereng barat Gunung Merapi (Sand Surfing Boy)	Wahana selancar pasir	-	-	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
		Persentase pengembangan kampung wisata kreatif	pembentukan/ pengembangan desa wisata berbasis produk unggulan dan produk kreatif	Pengembangan Desa Wisata Tamu Asing Wisata Selo (DESWITA)	Jumlah desa/ kelurahan	50	50	50	50	267	Pariwisata	Disporapar
				One Destination One Village	Jumlah desa/	50	50	50	50	267	Pariwisata	Disporapar

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					kelurahan							
				Mengadakan Lomba Kampung Kreatif yang nyaman dihuni, layak disinggahi, layak dikunjungi (Kampoeng Kreatif)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pariwisata	Disporapar
2.	terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik pasaran (business Branding)	Prosentase produk unggulan daerah yang dipasarkan melalui e-commerce dan dash board Boyolali	Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan Boyolali	e-komodita Boyolali (e-commerce)	Cakupan produk unggulan yang e-commerce	50%	75%	100%	100%	100%	Perdagangan	Disdagperin

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Prosentase produk/jasa unggulan yang dikelola dengan bisnis baru	- Pembangunan dan pengembangan sistem pemasaran produk/jasa unggulan Boyolali seperti soto, abon, susu, dan lain-lain; - Pengenalan dan pengembangan sistem pemasaran produk/jasa industri kreatif seperti kuliner, kriya, <i>fashion</i> , digital, cinderamata,	Pengembangan kawasan pertenakan sapi perah terpadu di (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel)	Cakupan kawasan pertenakan sapi perah terpadu	25%	50%	75%	100%	100%	Pertanian	Disnakkan
				Pembangunan <i>Sains Agro Technopark</i> Boyolali (STP Boy)	Prosentase pembangunan <i>Sains Agro Technopark</i> Boyolali	25%	50%	75%	100%	100%	Pertanian dan Pariwisata	Dispartan dan Disporapar
				Pengembangan Sistem Informasi Profil Peluang Investasi Kabupaten Boyolali (SIP Boy)	Cakupan profil peluang dalam sistem informasi investasi	50%	100%	100%	100%	100%	Penanaman Modal	DPMPTSP

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dan lain-lain.	Penerapan Sistem <i>One Ticket</i> di Daerah tujuan Wisata (SOT Wis)	Cakupan daerah tujuan yang menggunakan <i>one ticket</i>	25%	50%	100%	100%	100%	Pariwisata	Disporapar
3.	terbangunnya wajah kota yang menarik pasaran (<i>City appearance Branding</i>)	Jumlah bangunan khas dan mudah dikenal	penataan kembali wajah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional	memperbaiki dan membangun gapura batas wilayah yang ikonik dan <i>instagramable</i> (gapura asyik)	jumlah gapura batas wilayah yang ikonik	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pariwisata	DPUPR dan Disporapar
				Membangun Miniatur <i>Seven Wonder</i> (7 wonder)	Miniatur <i>Seven Wonder</i>	3	4	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Lingkungan	DPUPR dan DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											Hidup	
				Membangun Jembatan <i>Golden Gate</i> Kelurahan Siswodipuran (JGG Boy)	Jembatan <i>Golden Gate</i>	1 unit	-	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		Jumlah taman tematik	pembangunan taman-taman tematik untuk memberikan ciri khas dan kesan Boyolali;	Pembangunan taman tematik	Taman tematik	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Lingkungan Hidup	DLH
		Jumlah bangunan ikon Boyolali	pembangunan/ pembuatan ikon-ikon Boyolali sebagai penanda seperti sapi,	Pembangunan ikon Boyolali	Bangunan ikon	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Lingkungan Hidup	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			susu, lele, jagung, dan lain-lain.									
		Prosentase pemuatan bangunan khas, taman tematik, dan bangunan ikonik di media digital	Pemasaran Boyolali di tingkat internasional sebagai kota yang nyaman dikunjungi, dan nyaman dihuni <i>for everybody</i> .	<i>dash board</i> icon Boyolali	Cakupan icon dalam <i>dash board</i> icon Boyolali	100%	100%	100%	100%	100%	Pariwisata	Disporapar
C.	<i>Smart Economy</i>											
1.	terbangunnya boyolali pro investasi dan ekosistem industri yang berdaya saing	Indeks kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business/EoD</i>)	Penyederhanaan proses, kemudahan akses, dan kepastian biaya perizinan	Penyederhanaan proses	Penerapan perizinan terpadu satu pintu	100%	100%	100%	100%	100%	Penanaman modal	DPMPSTSP
					Cakupan SOP layanan yang	100%	100%	100%	100%	100%	-	Perangkat daerah/unit penyelenggara

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					dievaluasi/ disederhana kan							pelayanan
				Sistem informasi investasi Boyolali	Penerapan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Penanaman modal	DPMPTSP
2.	terwujudnya kesejahteraan rakyat berbasis	Produk unggulan daerah yang dikelola dengan model	Peningkatan daya saing industri daerah pada <i>leading sector</i>	Penyediaan tempat pemasaran produk Boyolali	<i>Galery Boyolali Wow (GaBoW)</i>	-	75%	100%	100%	100%	Perdagangan	Disdagperin

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	produk unggulan daerah (<i>welfare</i>)	bisnis baru	4 industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (pertanian, peternakan, dan perikanan), industri sekunder (manufaktur, pengolahan, dan <i>packaging</i>), dan industri tersier (pasar produk daerah);	7 <i>Workshop</i> dan <i>Showroom</i> Logam	8 IKM yang mengikuti pelatihan	9 165	10 174	11 182	12 191	13 199	14 Perdagangan	15 Disdagperin
			pengembangan industri kreatif berbasis potensi daerah (susu, kopi, kesenian daerah, dan usaha mikro kecil dan menengah)	pembinaan dan memperkuat jaringan klaster Industri	Jumlah IKM	45	49	55	60	64	Perindustrian	Disdagperin



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengembangan industri wisata agro (wisata pertanian/ panen padi, panen sayuran, olahan susu, dan wisata perikanan).	memperkuat jaringan industri agro	Jumlah IKM	120	125	127	132	135	Perindustrian , Pertanian	Disdagperin, Dispertan, dan Disnakkan
			pengendalian inflasi daerah	pengendalian inflasi daerah	Pasar grosir bahan pokok	-	1	1	1	1	perdagangan	Bagian Perekonomian Setda, Disdagperin, dan BUMD
			peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat (<i>empowerment</i>)	Program <i>one village one product</i>	Cakupan program <i>one village one product</i>	4%	8%	12%	33%	49%	Pertanian dan UMKM	Dispertan dan Dinkopnaker
			peningkatan ketahanan	Sistem Informasi Panen dan	Penerapan sistem	-	100%	100%	100%	100%	Ketahanan Pangan dan	DKP, Dispertan,

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pangan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal dan optimalisasi peran BUMD sebagai penyangga kebutuhan pokok masyarakat.	Ketersediaan Pangan Boyolali (SIPAKEBO)	informasi						Pertanian	dan Disnakkan
				Gerakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Cakupan desa Rumah Pangan Lestari (KRPL)	8%	16%	25%	33%	41%	Ketahanan Pangan	DKP
				Sistem Informasi asuransi usaha tanaman padi dan ternak sapi	Jumlah asuransi usaha tanaman padi	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	Pertanian	Dispertan dan Disnakkan
					Jumlah asuransi ternak sapi	1000 Sapi	1000 Sapi	1000 Sapi	1000 Sapi	1000 Sapi	Pertanian	Disnakkan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sistem informasi lumbung dan keamanan pangan Boyolali	Penerapan sistem informasi	-	100%	100%	100%	100%	Ketahanan Pangan	DKP
				Sistem Informasi Monitoring sapi (SIMAPI)	prosentase sapi perah yang dimonitor	5%	15%	30%	45%	60%	Pertanian	Disnakan
				Sistem Informasi Layanan Jaya Alsintan (SiLajal)	usaha jasa alsintan	38 opja	38 opja	38 opja	38 opja	38 opja	Pertanian	Dispartan
				Bantuan keringanan PBB untuk LP2B	Prosentase lahan LP2B yang menerima keringan PBB	100%	100%	100%	100%	100%	Pertanian dan Keuangan	Dispartan, BKD

✕

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	terbangunnya ekosistem transaksi keuangan yang mudah dan cepat	Pertumbuhan transaksi keuangan secara elektronik	- pembangunan ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang <i>less cash</i> - peningkatan masyarakat yang <i>bankable</i> dan memiliki akses terhadap permodalan - pembangunan ekosistem ekonomi digital dengan	E-Retribusi pasar	Prosentase pasar yang menerapkan E-retribusi pasar	25%	75%	100%	100%	100%	Perdagangan	Disdagperin
				Penerapan transaksi non tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan layanan transaksi non tunai dalam penyeleng- garaan pemerintahan dan pelayanan publik	25%	65%	100%	100%	100%	Keuangan	BKD
				Penerapan transaksi non tunai dalam perdagangan	Sistim informasi e-commerce Boyolali,	1 sim	1 sim	1 sim	1 sim	1 sim	Keuangan	Bagian Perekonomian Setda dan PD terkait

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			mendorong industri e-commerce dan market place	masyarakat	toko on line Boyolali, dan lain-lain							
			peningkatan kemudahan akses modal dan pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	pelatihan bagi usaha mikro kecil (UMK) mengenai per-bank-kan dan permodalan	Cakupan pengusaha yang mendapat pelatihan	10%	20%	30%	40%	50%	Usaha Mikro Kecil	Dinkopnaker
D.	Smart Living											
1.	terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman	Cakupan pemenuhan lahan ruang terbuka sesuai peruntukkan dan ketentuan	Penataan dan pembangunan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman dan harmonis antara	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Tingkat ketaatan ketentuan cakupan RDTR yang ruang terbuka	100%	100%	100%	100%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			lingkungan pemukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perdagangan dan jasa yang didukung dengan fasilitas ruang terbuka hijau dan penataan dan pembangunan ruang publik daerah.	Koordinasi/rekomendasi rencana pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan	Cakupan rekomendasi pemanfaatan lahan baru sesuai peruntukan	100%	100%	100%	100%	100%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				SIG (Sistem Informasi Geografis) pola ruang Kabupaten Boyolali	Cakupan sistem SIG	25%	50%	75%	100%	100%	Perencanaan	BP3D
				SIP (Sistem Informasi Pertanahan) peta bidang tiap desa/kelurahan se Kabupaten Boyolali	Cakupan desa/kelurahan dalam SIP	25%	50%	75%	100%	100%	Pertanahan	DPUPR

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sistem Informasi realtime data perumahan di Kabupaten Boyolali (SIAPERUM)	Penerapan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
2.	terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat yang memadai	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat	peningkatan cadangan air baku (pembuatan embung); peningkatan cakupan layanan air bersih, baik dari perusahaan penyedia air bersih maupun swadaya masyarakat	Program satu desa satu embung	Prosentase desa yang memiliki embung	10%	17,5%	25%	32,5%	40%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa air bersih	Cakupan kepala keluarga yang terlayani jaringan pipa air bersih	375	400	425	450	475	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR dan PDAM

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan dan pengolahan air bersih	Pembangun water treatment	Kemampuan mengolah air bersih yang belum memenuhi baku	30%	45%	60%	75%	90%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
3.	terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadai serta lingkungan yang bersih dan sehat	rasio jumlah penduduk dengan jumlah dokter dan jumlah puskesmas/ rumah sakit.	peningkatan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan (<i>healthcare</i>)	pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase pasien yang menggunakan jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD
					Prosentase Puskesmas Memenuhi Standar (terakreditasi)	77%	96%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Cakupan pelayanan rumah sakit	96%	98%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD
		Cakupan ketersediaan sarana olah raga	peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>)	Pembangunan sarana-sarana oleh yag memadahi	Prosentase kecamatan yang memiliki sarana-sarana oleh yag memadahi	50%	75%	100%	100%	100%	Pemuda dan Olahraga	Disporapar
		Prosentase desa/kelurahan yang menerapkan budaya hidup bersih	peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Penerapan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Prosentase desa yang menerapkan STBM	66%	75%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes
				Penerapan	Prosentase	35%	38%	45%	55%	65%	Kesehatan	Dinkes

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				program UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat)	desa yang menerapkan UKBM							
				Sukarelawan muda kader kesehatan desa siaga (SUKMADESI)	Prosentase desa yang memiliki kader	50%	100%	100%	100%	100%	Kesehatan	Dinkes
4.	Terciptanya lalu lintas yang nyaman bagi masyarakat	Penurunan tingkat kemacetan lalu lintas	peningkatan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas (<i>mobility</i>) bagi orang dan barang	Penerapan ARTIS (Aplikasi Real Time Sistem Informasi Transportasi)	Cakupan penerapan ARTIS	-	100%	100%	100%	100%	Perhubungan	Dishub

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pemasangan rambu-rambu dan alat kelengkapan jalan sesuai standar	Aplikasi Area <i>Traffic Control System</i> (AATCS)	Cakupan penerapan AATCS	-	100%	100%	100%	100%	Perhubungan	Dishub
			penataan parkir yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pengendara.	Sistem Informasi Pelayanan Perpakiran (SIPP)	Cakupan penerapan SIPP	-	100%	100%	100%	100%	Perhubungan	Dishub
E.	Smart Society											

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	terwujudnya interaksi masyarakat yang efisien	Pertumbuhan kelompok masyarakat kreatif	peningkatan interaksi sosial masyarakat antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital)	Medsos grup Boyolali <i>smile of java</i> (MBOY)	Jumlah anggota group	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu maupun sosial dalam memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif	Pendayagunaan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Cakupan dana CSR yang dikelola terpadu	-	20%	40%	60%	80%	Sosial	Dinsos
			peningkatan sinergitas antara bidang-bidang dalam penyerapan tenaga kerja dan membangun informasi pasar kerja yang efektif	Optimalisasi BLK (BLK OKE)	cakupan program BLK sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	Tenaga kerja	Dinkopnaker
				Lowongan bursa kerja (Loker)	Jumlah kegiatan per tahun	1	1	1	1	1	Tenaga kerja	Dinkopnaker

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			peningkatan kreativitas masyarakat Boyolali (<i>Boyolali creative</i>) dan kolaborasi antar komunitas (<i>co-working community</i>).	Ajang kreativitas dan inovasi (kreatanova Boyolali)	Jumlah kegiatan per tahun	1	1	1	1	1	Tenaga kerja	Dinkopnaker
2.	terbangunnya ekosistem belajar yang efisien	Cakupan sekolah berbasis TIK (e-learning)	pengembangan pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi berkarakter Boyolali Masagi.	Pengembangan sekolah berbasis internet (<i>Schoolnet</i>)	Prosentase sekolah yang menerapkan sekolah berbasis internet (<i>Schoolnet</i>)	25%	50%	75%	100%	100%	Pendidikan	Disdikbud
		Prosentase sekolah yang memiliki	pengembangan platform edukasi	Sekolah Inklusi Boyolali (Siboy)	Prosentase sekolah yang	25%	50%	75%	100%	100%	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		keunggulan	bagi masyarakat.		menerapkan Sekolah Inklusi Boyolali							
				Memasukkan materi kependudukan di dalam ekstra kulikuler (Corner Kependudukan)	Prosentase sekolah yang memiliki materi kependudukan di dalam ekstra kulikuler	25%	50%	75%	100%	100%	Pendidikan	Disdikbud
				Wadah bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas (Forum anak)	Cakupan desa memiliki forum anak	7%	14%	28%	57%	100%	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	terwujudnya sistem keamanan masyarakat	Kecepatan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan sistem keamanan masyarakat	Pembentukan Unit reaksi cepat TIBUM TRANMAS (URC)	Jumlah team URC sesuai dengan jenis pelanggaran	2 team (Linmas dan Dahur a)	2 team (Tipi ring dan PKL)	2 team (PGO T dan Peka t)	2 team (Pat wal)	2 team (Peng aman an objek vital dan negosi asi)	Keterliban Umum	Satpol PP
				Sistem Informasi deteksi (Simdeteksi)	Prosentase kecamatan yang menerapkan sistem informasi deteksi dini	-	100%	100%	100%	100%	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
				Pemberdayaan komunitas siaga bencana	Cakupan desa tangguh rawan	50%	75%	100%	100%	100%	Keterliban Umum	BPBD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					bencana							
					Prosentase Linmas terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	Ketertiban Umum	Satpol PP
				Penerapan TIPIRING Humanis	Cakupan penerapan TIPIRING Humanis	30%	40%	50%	50%	50%	Ketertiban Umum	Satpol PP
				Penyediaan media curah pendapat sadar hukum secara elektronik	Web Satpol PP	1 web	1 web	1 web	1 web	1 web	Ketertiban Umum	Satpol PP
		Persentase tingkat waktu tanggap (<i>Response Time</i>)	Peningkatan sistem penanganan kebakaran.	<i>Rescue And Fire Call System</i>	Cakupan kecamatan Sistem Pelaporan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Ketertiban Umum	Satpol PP

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rate) kejadian kebakaran			dengan lokasi kebakaran							
4.	terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jumlah KUBE Mandiri	3 buah	6 buah	12 buah	18 buah	22 buah	Sosial	Dinsos
				Peningkatan ketrampilan dan penumbuhan jiwa wirausaha PMKS (Sitrapmil)	Wirusaha wan PKMS	10 org	20 org	30 org	40 org	50 org	Sosial	Dinsos
F.	Smart Environment											
1.	berkembangnya program pengendalian kualitas	Baku mutu kualitas lingkungan, limbah, dan	- pengendalian dan pengembangan sistem tata	Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Air Limbah Online	Penerapan sistem informasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Lingkungan Hidup	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	lingkungan	tingkat gangguan lingkungan	kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara;	(Simpankuali)								
			- pengintegrasian teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing (IoT)</i> dan sensor kualitas udara;	Sistem Informasi Kualitas Udara (SIKURA)	Penerapan informasi kualitas udara	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Lingkungan Hidup	DLH
				Sistem pelaporan dan pemantauan pengelolaan limbah (Sippali)	Jumlah usaha/ kegiatan yang menerapkan pelaporan dan pemantauan pengelolaan limbah (Sippali)	50	50	50	50	50	Lingkungan Hidup	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sistem respon cepat aduan pencemaran lingkungan (sispomalin g)	25%	50%	75%	100%	100%	Lingkungan Hidup	DLH
2.	berkembangn ya tata kelola sampah dan limbah	Cakupan layanan pengelolaan sampah di TPA	Peningkatan layanan pengelolaan sampah di TPA	Tempat Pengolahan Sampah 3R tiap Kecamatan	Terwujudn ya TPS 3 R tiap Kecamatan	1 Kec	2 Kec	2 Kec	3 Kec	3 kec	Lingkungan Hidup	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Prosentase penurunan volume sampah	pengembangan sistem tata kelola sampah rumah tangga (<i>household</i>), industri (<i>industrial</i>), dan aktifitas publik (<i>public</i>);	Sistem Informasi Bank Sampah Terintegrasi (Bank Santri)	Terbentuknya Bank sampah terintegrasi	25%	50%	75%	100%	100%	Lingkungan Hidup	DLH
			peningkatan peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> untuk melakukan pengelolaan sampah	Unit Pengolahan Sampah Tiap Desa (UPS-DESA)	Terwujudnya Unit Pengolah sampah organik	-	1 Unit UPS	2 unit UPS	2 Unit UPS	2 Unit UPS	Lingkungan Hidup	DLH
			pengembangan kerjasama dan teknologi	pengembangan kerjasama dan teknologi	Jumlah kerjasama pengelolaan	1	1	1	1	1	Lingkungan Hidup	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pengelolaan sampah	pengelolaan sampah	sampah							
					Jumlah penerapan teknologi pengelolaan n sampah	1	1	1	1	1	Lingkungan Hidup	DLH
			penegakan peraturan pengelolaan sampah	Pembentukan tim buru sergap pembuangan sampah dan limbah sembarangan	Terbentuknya Tim Buser Sampah dan Limbah	-	1 kec.	2 kec.	3 kec.	4 kec.	Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum	DLH dan Satpol PP
			-	Pembentukan forum peduli lingkungan	Terbentuknya forum peduli lingkungan	1 forum	1 forum	1 forum	1 forum	1 forum	Lingkungan Hidup	DLH
3.	terkelolanya ruang	Prosentase kecamatan yang	pemenuhan pembangunan	Pembangunan Taman Edukasi	Terbangun	2 kec.	2 kec.	3 Kec.	3 Kec.	5 Kec.	Lingkungan	DLH

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Indikasi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capain kinerja					Bidang Urusan	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kebun Raya Indrakila Tematik	Pengemba- ngan Indrokila tematik	1 tema	1 tema	1 tema	1 tema	1 tema	Lingkungan Hidup	DLH
				Pembangunan taman <i>Smart City</i>	Terbangu- nya taman <i>Smart City</i>	-	30%	80 %	100%	100%	Lingkungan Hidup dan Kominfo	DLH dan Kominfo

BAB VI. PENUTUP

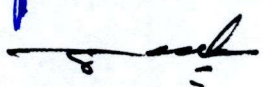
Dokumen *Master Plan Smart City* Boyolali Tahun 2019-2023 ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan *Smart City* Boyolali selama waktu lima tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dokumen ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dokumen *Master Plan Smart City* berisi rencana rinci pembangunan *Smart City* Boyolali dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan indikator kinerja (hasil kerja) per tahun yang jelas.

Program/kegiatan dalam *Master Plan Smart City* ini harus menjadi program/kegiatan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Guna menjamin konsistensi dan keberlangsungan, *Master Plan Smart City* harus sinkron dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selain itu, program/kegiatan tahunan juga harus sinkron dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu komunikasi aktif dengan para perencana di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali dan pejabat perencana perangkat daerah sangat diperlukan. Secara teknis dapat dilakukan evaluasi dalam rangka perencanaan *Smart City* dilakukan.

Keberhasilan pelaksanaan *Master Plan Smart City* ini juga memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan pejabat-pejabat pelaksana *Smart City* pada perangkat daerah Kabupaten Boyolali. Selanjutnya pelaksanaan *Smart City* juga perlu dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki agar pelaksanaan semakin efektif dan efisien.

Selain itu keterbatasan waktu dan sumber daya penyusun *Master Plan Smart City* ini menyebabkan belum semua indikasi program/kegiatan yang mendukung terwujudnya *Smart City* Boyolali,

baik yang merupakan kewenangan dan tugas pemerintah daerah maupun yang merupakan urusan swasta dan masyarakat, dapat diambil dan dimasukkan dalam dokumen *Master Plan* ini. Dokumen ini masih jauh dari sempurna menggambarkan proses Kabupaten Boyolali mewujudkan *Smart City*. Oleh karena itu Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Boyolali agar peka dan merespon usulan/ masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan *Smart City* Boyolali, serta mengakomodir program/kegiatan lain yang mendukung pencapaian *Smart City* Boyolali meskipun belum menjadi bagian dari dokumen ini.

BUPATI BOYOLALI, 

2 SENO SAMODRO

